


Percaturan Politik Genealogi Kekuasaan dalam Sistem Pemilu '2024' di Indonesia Menurut Etika Michel Foucault

Yohanes Alfrid Aliano¹, Mathias Jebaru Adon²

^{1,2} Filsafat Keilahan: Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang, Malang, Indonesia
E-mail: alfridyohanes@gmail.com¹, mathiasjebaruadon@gmail.com²

	<i>This is an open-access article under the CC BY-SA license. Copyright © XXXX by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.</i>	
Diterima: 05-06-2023	Direview: 16-06-2023	Publikasi: 30-09-2023

Abstrak

Fokus dalam penelitian ini mengkaji lebih mendalam makna Politik Kekuasaan Michel Foucault dalam sistem demokrasi percaturan politik Pemilu '2024' di Indonesia. Penulis menempatkan sistem pemilu dalam ranah pemilu 2024 sebagai pemantik untuk menganalisis lebih mendalam diskursus mengenai politik genealogi kekuasaan di Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir perlu didiskusikan dalam diskursus politis-filosofis. Tujuan dari penelitian ini mengurai nilai filsafat etika Michel Foucault terhadap sistem demokrasi di Indonesia yang mulai mendapat perhatian khusus menjelang pemilu 2024. Tujuan utama penelitian ini menganalisis kritik Michel Foucault terhadap sistem pemilu di Indonesia berdasarkan pandangannya tentang kekuasaan dan pengetahuan. Sedangkan, tujuan khusus penelitian ini mengidentifikasi elemen-elemen kekuasaan dalam sistem pemilu, mengevaluasi relasi antara kekuasaan, dan pengetahuan dalam proses pemilu yang dilakukan oleh politikus di Indonesia. Etika kekuasaan Foucault memaksudkan peran demokrasi Indonesia yang tetap berada pada landasan konstitusional demokrasi yang berkedaulatan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Penulis menggunakan metode *library research* untuk mendeskripsikan filsafat etika Foucault dan selanjutnya penulis mengomparatifkannya dengan analisis fenomenologis situasi dinamika politik di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa genealogi politik kekuasaan merupakan sistem demokrasi yang cacat bagi Pemerintah Indonesia karena cenderung berseberangan dengan nilai etis Pancasila dan UUD 1945. Maka, diperlukan kebijaksanaan berpikir kritis filosofis untuk mempertanyakan asal-usul, konstruksi, dan efek dari praktik-praktik kekuasaan yang ada dalam pemilu dengan nilai etis pemikiran Michel Foucault, sehingga setiap orang yang memainkan percaturan politik itu tetap berlandaskan pada landasan konstitusional Negara Indonesia, yakni Pancasila dan UUD 1945.

Kata Kunci: politik kekuasaan; genealogi; demokrasi; pemilu; etika Michel Foucault

Abstract

The focus of this research is to examine more deeply the meaning of Michel Foucault's Politics of Power in the democratic system of the '2024' election politics in Indonesia. discussed in political-philosophical discourse. The purpose of this study is to analyze Michel Foucault's ethical philosophy of the democratic system in Indonesia which is starting to receive special attention ahead of the 2024 elections. The main objective of this study is to analyze Michel Foucault's criticism of the electoral system in Indonesia based on his views on power and knowledge. Meanwhile, the specific objective of this study is to identify the elements of power in the electoral system, evaluate the relationship between power and knowledge in the electoral process carried out by politicians in Indonesia. Foucault's power ethic refers to the role of Indonesian democracy which remains on the constitutional basis of democracy which is sovereign from the people, by the people and for the people. The author uses the library research method to describe Foucault's ethical philosophy and then the author compares it with a phenomenological analysis of the situation of political dynamics in Indonesia. This research shows that the genealogy of power politics is a flawed democratic system for the Government of Indonesia because it tends to be at odds with the ethical values of Pancasila and the 1945 Constitution. Therefore, a philosophical critical thinking policy is needed to question the origins, construction, and effects of existing power practices in elections. with the ethical values of Michel Foucault's thought so that everyone who plays the political arena remains based on the constitutional foundations of the Indonesian State, namely Pancasila and the 1945 Constitution

Keywords: power politics; genealogy; democracy; elections; Michel Foucault's ethics

1. Pendahuluan

Pemilu merupakan proses yang esensial dalam sistem demokrasi di Indonesia, warga negara memiliki hak untuk memilih wakil mereka sebagai pemimpin dalam pemerintahan. Namun, proses politik dalam pemilu tidak terlepas dari kekuasaan dan interaksi yang kompleks antaraktor politik. Dalam konteks Indonesia, pemilu menjadi momen penting dalam menjaga stabilitas demokrasi dan keberlanjutan proses politik, di mana kepemimpinan selanjutnya menjadi cita-cita bangsa dalam memajukan negara (Prabowo, 2020). Dalam setiap pemilihan umum, konteks politik menjadi penting karena memengaruhi dinamika kekuasaan di dalam masyarakat. Dalam tulisan ini, penulis akan menjelajahi percaturan politik genealogi kekuasaan dalam sistem pemilu 2024 di Indonesia dari perspektif etika Michel Foucault. Dalam konteks pemilu 2024 di Indonesia, analisis etika politik genealogi kekuasaan menurut Michel Foucault dapat memberikan wawasan yang berharga dalam membangun sistem yang lebih baik dalam sistem politik di Indonesia (Susanto, 2021).

"Percaturan Politik Genealogi Kekuasaan dalam Sistem Pemilu '2024' di Indonesia Menurut Etika Michel Foucault" mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang analisis politik, pemilu, genealogi kekuasaan, dan konsep etika Michel Foucault. Penelitian sebelumnya dalam politik dan genealogi telah mengidentifikasi peran kekuasaan dalam membentuk struktur sosial dan politik (Barry, 1996; May, T. 2013; Wiradnyana, 2018; (Khozin Af & Ushuluddin, n.d.)). Sebaliknya, kekuasaan muncul dan beroperasi melalui jaringan relasi dan praktik-praktik yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks pemilu, kekuasaan tidak hanya berasal dari pemerintah atau lembaga politik formal, tetapi juga melibatkan interaksi antara individu, partai politik, institusi, dan struktur sosial yang lebih luas. Studi tentang etika Foucault telah membuka pemahaman tentang bagaimana individu merespons dan berinteraksi dengan kekuasaan dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, analisis pemilu telah berkaitan dengan mekanisme suara, partisipasi, dan narasi politik.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penggabungan tiga aspek etika kekuasaan Michel Foucault dalam konteks pemilu '2024' di Indonesia. Konsep genealogi kekuasaan Foucault digunakan untuk membongkar lapisan-lapisan kuasa dalam sistem pemilu dan bagaimana hal tersebut memengaruhi pengaturan narasi dan pengetahuan politik. Sementara itu, etika Foucault membuka jendela untuk melihat bagaimana individu dan masyarakat merespons, melawan, atau mentransformasi kuasa tersebut. Kajian ini menghubungkan politik, genealogi, dan etika dalam analisis yang holistik dan mendalam terhadap sistem pemilu '2024' di Indonesia. Keseluruhan, keunikannya adalah dalam pendekatan interdisipliner yang menciptakan wawasan baru tentang peran kekuasaan, partisipasi, dan etika dalam konteks politik modern.

Dengan pemahaman ini, analisis etika politik genealogi kekuasaan menurut Foucault dapat membantu kita mempertanyakan praktik-praktik kekuasaan yang dominan, memperkuat upaya untuk melibatkan masyarakat secara aktif, serta membangun sistem pemilu yang lebih inklusif, adil, dan demokratis. Lantas yang menjadi *point of view* dari penelitian ini adalah Bagaimana pemikiran kekuasaan Michel Foucault dapat mengkritisi dan menganalisis sistem pemilu di Indonesia? Bagaimana struktur kekuasaan muncul dan memengaruhi sistem pemilu? Bagaimana relasi antara kekuasaan dan pengetahuan dalam konteks pemilu di Indonesia?

Dengan pertanyaan-pertanyaan di atas penelitian ini dapat memberikan pandangan kritis tentang sistem pemilu di Indonesia dari sudut pandang teori kekuasaan Michel Foucault sekaligus menawarkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika kekuasaan dan pengetahuan dalam proses politik dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi politik, memastikan kebebasan, dan memperkuat demokrasi dalam proses pemilihan umum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi konstitusi dan pedoman hidup dalam berbangsa dan bernegara (Riyanto, dkk, 2015).

2. Metode

Penelitian ini menggunakan studi literatur atau *library research*, yaitu studi literatur baik buku dan artikel *online* maupun analisis konten media sosial secara kritis dan tajam atas fenomena demokrasi sistem pemilihan umum di Indonesia dan mengomparasikannya pada etika politik kekuasaan Michel Foucault. Pertama, Penulis memberikan deskripsi demokrasi percaturan politik di Indonesia secara khusus dalam pemilu 2024 di mana data diperoleh dari analisis konten dinamika politik baik media sosial maupun jurnal-jurnal. Kedua, penulis mendeskripsikan landasan etis filosofis pemikiran berkaitan dengan politik kekuasaan Michel Foucault dalam sistem demokrasi politik. Ketiga, Penulis merelevansikan kedua gagasan tersebut dalam refleksi etis-filosofis berkaitan dengan konteks kehidupan politik di Indonesia secara kritis, tajam dan sarat akan nilai-nilai etis.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Percaturan Politik dalam Sistem Pemilu

Pemilu adalah suatu proses politik yang penting dalam sistem demokrasi modern di seluruh dunia. Dalam pemilu, warga negara memiliki kesempatan untuk memilih wakil-wakil mereka dalam pemerintahan dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik. Pemilu mencerminkan esensi dari demokrasi, di mana kekuasaan politik merupakan bentuk kedaulatan rakyat: dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Hardianto, 2019). Melalui pemilu, masyarakat dapat memberikan suara mereka dan memengaruhi komposisi pemerintah serta kebijakan publik, penentu masa depan bangsa.

Pemilu itu sendiri melibatkan berbagai tahapan dan proses yang kompleks (Susilo & Pratama, 2008). Tahap persiapan ini meliputi penyusunan daftar pemilih, pembentukan lembaga pemilihan, dan penyusunan peraturan pemilu. Tahap ini merupakan fondasi penting untuk memastikan pemilu dilaksanakan secara adil dan transparan. Selanjutnya, tahap kampanye politik menjadi momen di mana partai politik dan calon-calonnya berkompetisi untuk mendapatkan dukungan dan memengaruhi opini publik. Kampanye politik mencakup aktivitas seperti debat publik, pertemuan massa, dan penggunaan media sosial.

Pada saat hari pemilihan, warga negara memiliki kesempatan untuk memberikan suara mereka. Pemilih dapat memilih calon yang mereka anggap paling sesuai dengan pandangan politik dan kepentingan mereka. Setelah pemilihan, dilakukan proses penghitungan suara dan penentuan hasil pemilu. Hasil pemilu akan menentukan komposisi parlemen atau pemerintah yang akan memerintah untuk periode berikutnya. Pemilu memiliki signifikansi yang besar dalam proses politik. Pemilu memungkinkan adanya transisi kekuasaan secara damai. Dengan mengadakan pemilu secara teratur, perubahan pemerintahan dapat dilakukan tanpa kekerasan atau ketidakstabilan politik (Santoso & Indrawan, 2017). Pemilu juga menjadi sarana bagi warga negara untuk mengekspresikan preferensi politik mereka dan memilih pemimpin yang mewakili nilai-nilai dan kepentingan mereka.

Namun, pemilu juga menghadapi tantangan dan masalah. Salah satu tantangan utama adalah adanya kecurangan pemilu, seperti kecurangan dalam penghitungan suara atau intimidasi pemilih, dst. Upaya untuk memastikan integritas pemilu dan mengatasi kecurangan tersebut menjadi penting dalam menjaga legitimasi proses politik (Rahayu & Raharjo). Selain itu, partisipasi politik juga menjadi isu kritis dalam pemilu. Partisipasi dalam politik merupakan upaya untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang mungkin kurang terwakili.

Temuan utama Foucault adalah bahwa kekuasaan bukanlah entitas yang dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu, tetapi lebih sebagai hubungan sosial yang kompleks. Kekuasaan muncul dan beroperasi melalui jaringan relasi dan praktik-praktik yang ada dalam masyarakat (Gordon, dkk, 1991). Dalam konteks politik, kekuasaan tidak hanya berasal dari pemerintah atau lembaga politik formal, tetapi juga terdapat dalam relasi kekuasaan yang terjalin di antara individu, institusi, dan struktur sosial (Rahayu & Raharjo, 2018).

b. Historisitas Politik Genealogi Kekuasaan

Di Indonesia, sejarah politik genealogi kekuasaan dalam pemilu dapat ditelusuri dari beberapa periode penting. Dalam pengertian dan konteks demokrasi di Indonesia penulis tidak memaksudkan makna genealogi dengan berfokus pada makna hakiki, melainkan pada sistem. Dengan ini makna kata genealogi dapat diatribusikan pada 'percaturan politik'. Beberapa contoh sejarah politik genealogi kekuasaan dalam sistem pemilu di Indonesia yang menjadi gambaran makna genealogi tersebut.

Era Orde Baru (1966-1998). Pada era Orde Baru, pemilu di Indonesia memiliki karakteristik yang sangat terkendali oleh rezim otoriter yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Pemilu pada masa itu secara umum tidak menghasilkan perubahan politik yang signifikan, karena partai politik dan calon-calon yang berposisi terhadap rezim secara sistematis ditekan dan diintimidasi. Rezim Orde Baru menggunakan kekuasaan politiknya untuk mempertahankan dominasinya dalam pemilu dan mengendalikan hasil pemilu sesuai kepentingan mereka (Kusuma & Anugrah, 2016).

Reformasi (1998-sekarang). Setelah runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia mengalami transisi menuju demokrasi yang lebih terbuka. Reformasi politik membawa perubahan signifikan dalam sistem pemilu. Pada tahun 1999, digelar pemilu legislatif yang diikuti oleh pemilu presiden pada tahun 2004. Pemilu pada periode reformasi memberikan ruang yang lebih luas bagi partai politik dan calon-calon independen untuk bersaing secara adil. Pemilu

menjadi instrumen penting dalam perubahan kekuasaan politik dan pemerintahan di Indonesia (Pranowo & Wijaya, 2015).

Pemilu 2014 dan 2019. Pada pemilu 2014, Indonesia menyaksikan kontestasi politik yang sengit antara beberapa partai politik utama. Perolehan suara partai-partai politik dalam pemilu legislatif menentukan posisi mereka dalam perundingan pembentukan koalisi pemerintahan. Pemilu presiden pada tahun yang sama juga menjadi momen penting dalam menentukan pemimpin nasional. Pemilu 2019 merupakan pemilu yang cukup bersejarah, di mana partai politik Islamis yang konservatif mendapatkan dukungan yang signifikan, mencerminkan dinamika politik yang juga beragam di Indonesia (Handayani & Suwardi, 2014).

Pada pemilu 2024 di Indonesia akan menjadi momen yang menentukan dalam proses politik genealogi kekuasaan. Pemilu tersebut akan menjadi ajang persaingan politik yang intens antara partai politik dan calon-calon mereka. Dalam konteks ini, genealogi kekuasaan dalam pemilu akan terus berkembang dan melibatkan faktor-faktor seperti strategi kampanye, penggunaan teknologi komunikasi, serta dinamika politik dan sosial di Indonesia. Genealogi politik kekuasaan ini tampaknya dengan lahirnya generasi-generasi baru anak-anak partai dan anak-anak pemimpin dalam suatu lingkaran sistem kepemimpinan yang *notabene* digunakan demi kepentingan pribadi maupun golongan yang semakin kasat mata.

Sejarah politik genealogi kekuasaan dalam pemilu di Indonesia menunjukkan perubahan dan tantangan dalam sistem politik. Meskipun pemilu telah menjadi instrumen penting dalam proses demokratisasi, masih ada isu-isu yang perlu ditangani, seperti kecurangan pemilu, partisipasi politik yang lebih inklusif, dan upaya untuk memanuver berbagai sistem dan masyarakat yang dengan berbagai sumber kejahatan yang semakin tak terkendalkan. Untuk itu diperlukanlah suatu etika yang mengatur sistem ini agar sistem demokrasi tetap berjalan pada konstitusi dan pedoman hidup bangsa Indonesia.

Foucault (1977) menyoroti bahwa kekuasaan seringkali digunakan sebagai alat untuk menindas dan membatasi kebebasan individu. Dia menganalisis bagaimana pengetahuan, institusi, dan praktik-praktik kekuasaan dapat memengaruhi dan mengendalikan individu dalam masyarakat. Analisis genealogi politik kekuasaan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang berbagai mekanisme kontrol dan penindasan yang dilakukan oleh aktor politik melalui aturan, regulasi, dan norma-norma yang ada dalam pemilu.

Rabinow, P. (1984) menyatakan bahwa Foucault menggunakan pendekatan genealogi untuk melacak asal usul, perkembangan, dan transformasi kekuasaan dalam konteks historis. Hal ini melibatkan penelusuran sejarah praktik-praktik kekuasaan, struktur-struktur politik, dan hubungan-hubungan sosial yang membentuk dinamika kekuasaan. Penelitian terdahulu tentang politik kekuasaan juga mengadopsi pendekatan analisis yang serupa untuk memahami dan menjelaskan kekuasaan politik dalam masyarakat.

Analisis dinamika kekuasaan antara aktor politik menjelang pemilu 2024 di Indonesia melibatkan berbagai faktor politik, strategi, dan interaksi di antara mereka. Dinamika pergantian kekuasaan dalam suatu sistem demokrasi, penting untuk dianalisis, dikritisi dan menjadi proses hukum yang hendaknya disadari oleh masyarakat (Handoyo & Wibowo, 2009: 67-82). Dengan ini, masyarakat akan lebih mudah untuk memilih secara bijak, tidak mudah terprovokasi oleh mosi, narasi dan dogmatisasi nilai demokrasi demi kepentingan pribadi. Penulis menganalisis beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam suatu sistem pemilu, secara khusus menjelang pemilu 2024 sebagai suatu sistem politik.

Pertama, Persaingan antara Partai Politik. Partai politik akan bersaing untuk meraih dukungan pemilih dan memenangkan kursi dalam pemilu legislatif. Mereka akan menggunakan strategi kampanye, program kebijakan, dan retorika politik untuk memengaruhi pemilih. Partai politik juga akan berusaha membentuk koalisi dengan partai lain untuk meningkatkan kekuatan politik mereka dan mengamankan dukungan dalam pembentukan pemerintahan.

Kedua, Posisi Calon Presiden dan Wakil Presiden. Calon presiden dan wakil presiden dari berbagai partai politik akan menjalani persaingan yang ketat. Mereka akan berusaha membangun citra positif, menarik dukungan pemilih, dan mempresentasikan program kebijakan mereka. Strategi kampanye, pemilihan mitra koalisi, dan kemampuan untuk meraih dukungan partai politik lain akan menjadi faktor kunci dalam menentukan peluang calon untuk memenangkan pemilihan presiden.

Ketiga, Peran Masyarakat Sipil. Masyarakat sipil memiliki peran penting dalam pemilu dengan menyuarakan kepentingan dan isu-isu yang relevan bagi masyarakat. Mereka dapat memengaruhi agenda politik dan mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam proses pemilu. Organisasi masyarakat, LSM, dan kelompok advokasi akan terlibat dalam pemantauan

pemilu, pengawasan penggunaan dana kampanye, dan memastikan adanya ruang yang adil bagi semua aktor politik.

Empat, Pengaruh Media. Media massa memiliki peran yang signifikan dalam membentuk opini publik dan memengaruhi hasil pemilu. Media akan memberikan liputan yang berimbang terhadap partai politik dan calon, serta memainkan peran penting dalam memaparkan isu-isu yang relevan bagi pemilih. Namun, perlu diwaspadai adanya bias media dan penyebaran berita palsu yang dapat memengaruhi persepsi publik. Kontrol dan regulasi media yang memadai menjadi penting untuk memastikan keterbukaan dan integritas informasi selama pemilu.

Kelima, Peran Pemerintah dan Lembaga Terkait. Pemerintah dan lembaga terkait, seperti KPU dan Bawaslu, akan memainkan peran penting dalam menyelenggarakan pemilu yang adil dan teratur. Mereka harus menjaga independensi, transparansi, dan integritas proses pemilu, serta menangani pelanggaran hukum yang mungkin terjadi. Pemerintah juga akan memainkan peran dalam membentuk kebijakan dan menetapkan regulasi yang berkaitan dengan pemilu, termasuk pengaturan kampanye, penggunaan dana kampanye, dan akses media bagi semua aktor politik.

Foucault (1978) menyoroti pentingnya praktik kritis dan resistensi terhadap kekuasaan politik yang dominan. Analisis genealogi politik kekuasaan mengidentifikasi berbagai strategi dan taktik yang digunakan oleh aktor politik dan masyarakat untuk melawan atau mempertanyakan praktik kekuasaan yang ada. Dalam konteks pemilu, pemahaman tentang genealogi politik kekuasaan dapat memperkuat upaya untuk melibatkan masyarakat secara aktif, mengungkap ketidakadilan, dan mendorong perubahan politik yang lebih inklusif dan adil.

c. Etika Politik Kekuasaan Michel Foucault

Etika 'kekuasaan' merupakan pendekatan teoritis yang dikembangkan oleh filsuf Prancis Michel Foucault. Etika Foucault menekankan pemahaman terhadap konstruksi kekuasaan, pengaruhnya dalam membentuk norma dan nilai-nilai dalam masyarakat, serta dampaknya terhadap individu dan hubungan kekuasaan (Barry, A., Osborne, T., & Rose, N., 1996).

Dalam konteks politik, etika Foucault mengajukan perspektif kritis terhadap hubungan kekuasaan dalam masyarakat dan mencoba mengungkap mekanisme dibalik pembenaran dan penyalahgunaan kekuasaan politik. Foucault menawarkan suatu konsep penting dalam etika yang dapat diterapkan dalam konteks politik yang disebut etika kekuasaan.

Pertama, Analisis Kekuasaan, Foucault (1965) mengajarkan pentingnya menganalisis kekuasaan dalam konteks sosial dan politik. Dia menyoroti bahwa kekuasaan bukanlah sesuatu yang dimiliki secara eksklusif oleh individu atau kelompok tertentu, tetapi lebih merupakan suatu hubungan yang tersebar di seluruh masyarakat. Dengan menganalisis hubungan kekuasaan ini, kita dapat memahami cara di mana kekuasaan politik dijalankan, diterapkan, dan memengaruhi kehidupan individu.

Kedua, Arkeologi Pengetahuan, Pendekatan arkeologi pengetahuan Foucault (1972) menekankan pada pentingnya memahami konstruksi pengetahuan dan pengaruhnya terhadap politik. Foucault menunjukkan bagaimana pengetahuan dibentuk melalui praktek kekuasaan dan bagaimana pengetahuan politik memengaruhi pandangan kita tentang realitas politik. Dalam konteks politik, ini memungkinkan kita untuk memahami cara di mana pengetahuan dan narasi politik dapat membentuk persepsi dan tindakan politik.

Ketiga, Etika Diri dan Perubahan Diri, Foucault (1978) mengajukan gagasan etika diri sebagai praktek reflektif yang melibatkan individu dalam memeriksa dan mengubah diri mereka sendiri. Dalam konteks politik, etika diri mendorong individu untuk secara kritis mengevaluasi posisi politik mereka, kekuasaan yang mereka miliki, dan dampaknya terhadap orang lain. Dengan mempraktikkan etika diri, individu dapat membangun kesadaran politik yang lebih baik dan mengambil tanggung jawab atas pengaruh mereka dalam konteks politik.

Keempat, Resistensi dan Perlawanan, Foucault (1977) mengakui pentingnya resistensi dan perlawanan terhadap kekuasaan politik yang menindas. Dia menekankan bahwa dalam setiap hubungan kekuasaan, ada ruang bagi tindakan perlawanan dan transformasi. Dalam konteks politik, etika Foucault menginspirasi individu dan kelompok untuk melihat kekuasaan secara kritis, menantang struktur kekuasaan yang ada, dan berusaha menciptakan perubahan sosial yang lebih adil.

Peran teknologi etika komunikasi dalam pemilu juga sangat penting untuk memastikan integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses politik. Etika komunikasi sangat penting dalam membangun suatu sistem yang lebih terbuka (Nurudin, 2017). Etika komunikasi memaksudkan suatu cara menjunjung tinggi nilai demokrasi yang konstitusional (Pratama &

Winarno, 2013). Dalam konteks pemilu etika komunikasi sebagai instrumen yang membawa dinamika politik sebagaimana mestinya.

Teknologi etika komunikasi memungkinkan penyebaran informasi yang transparan dan akurat kepada pemilih (Rakhmat, 2013). Melalui media sosial, situs web, dan platform komunikasi lainnya, pesan politik dan informasi terkait pemilu dapat disebar dengan cepat dan efektif kepada masyarakat. Hal ini memungkinkan pemilih untuk mendapatkan akses yang lebih luas terhadap informasi yang relevan dan membuat keputusan yang lebih baik.

Etika komunikasi dapat memerangi penyebaran berita palsu. Dalam era digital, penyebaran berita palsu atau hoaks dapat menjadi ancaman serius dalam pemilu. Teknologi etika komunikasi berperan penting dalam memerangi penyebaran berita palsu dan disinformasi. Algoritma cerdas, pemantauan konten, dan upaya kolaboratif antara platform teknologi dan faktor-faktor keamanan dapat membantu mengidentifikasi dan memblokir konten yang tidak akurat atau menyesatkan.

Partisipasi politik yang merata juga menjadi penting dalam meningkatkan etika komunikasi (Yani, 2016). Teknologi etika komunikasi dapat meningkatkan partisipasi politik yang merata dengan menyediakan platform yang memungkinkan partisipasi aktif dari berbagai kelompok dan individu. Misalnya, forum diskusi *online*, aplikasi pemilihan umum, atau platform partisipatif dapat mendorong keterlibatan pemilih, termasuk mereka yang sebelumnya kurang terwakili dalam proses politik.

Sebagai instrumen etika komunikasi menjadi sarana yang memfasilitasi ruang dialog publik. Teknologi etika komunikasi memfasilitasi dialog publik yang lebih luas dan inklusif. Dalam konteks pemilu, platform komunikasi digital memungkinkan adanya diskusi dan debat terbuka antara calon, partai politik, dan pemilih. Ini dapat meningkatkan transparansi, memungkinkan pertukaran gagasan yang lebih luas, dan memperkuat partisipasi yang lebih demokratis.

Etika komunikasi juga sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas politik. Teknologi etika komunikasi dapat meningkatkan akuntabilitas aktor politik. Melalui platform digital, masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi tindakan para politisi, partai politik, dan lembaga pemerintah. Informasi yang terbuka dan aksesibel memungkinkan warga negara untuk menilai dan mempertanyakan kebijakan dan tindakan para pemimpin politik.

Namun, penting untuk diingat bahwa teknologi etika komunikasi tidak dapat sepenuhnya mengatasi semua masalah dalam pemilu. Ada tantangan dan risiko yang terkait dengan privasi data, penyalahgunaan teknologi, dan manipulasi informasi (Sugiharto, 2000). Oleh karena itu, perlindungan privasi, regulasi yang tepat, dan kesadaran akan etika dalam penggunaan teknologi sangat penting dalam konteks pemilu.

Demi menjunjung tinggi sistem demokrasi yang *luberjurdil* diperlukan suatu kritik etika dalam sistem politik. Kritik etika ini memungkinkan upaya kesadaran politik yang tidak hanya ditujukan pada pemerintah tetapi bagaimana rakyat bersikap (Yani, 2016). Salah satu kritik utama terhadap praktik politik dalam pemilu adalah tingginya tingkat korupsi. Praktik korupsi yang melibatkan calon politik dan partai politik dapat merusak integritas proses pemilu dan menciderai etika politik.

Praktik politik dalam pemilu sering kali melibatkan manipulasi informasi dan penyebaran berita palsu untuk memengaruhi persepsi publik. Hal ini dapat menciderai etika politik dengan merusak integritas proses pemilihan yang seharusnya didasarkan pada informasi yang akurat dan transparan (Yani, 2016). Selain itu juga praktik politik uang, di mana calon politik atau partai politik memberikan atau menjanjikan uang kepada pemilih untuk memperoleh dukungan mereka, merupakan salah satu kritik yang umum terhadap pemilu. Hal ini merusak prinsip kesetaraan dan mengubah pemilihan menjadi transaksi monetisasi yang tidak etis.

Menjelang pemilu berbagai cara dilakukan yang tidak sedikit mencemarkan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Praktik politik yang memanfaatkan isu-isu SARA untuk memperoleh dukungan pemilih juga sering dikritik secara etis. Memanfaatkan perbedaan dan memicu konflik antargolongan untuk keuntungan politik merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika politik yang mempromosikan kesetaraan dan solidaritas sosial (Hicks, 2004). Praktik politik hitam, seperti kampanye negatif, fitnah, atau serangan pribadi terhadap lawan politik, juga mendapatkan kritik etis. Hal ini merusak kualitas diskusi politik dan menciderai integritas pemilu dengan mengalihkan perhatian dari isu substansial ke serangan personal. Kritik etis juga ditujukan pada praktik politik yang memanfaatkan kekuasaan dan sumber daya publik untuk keuntungan pribadi, seperti nepotisme, kolusi, dan penyalahgunaan wewenang. Hal semacam inilah yang merusak prinsip-prinsip keadilan, akuntabilitas, dan integritas dalam proses politik (Kumahi, 2017).

d. Implikasi dan Dampak Percaturan Politik dalam Pemilu 2024

Percaturan politik genealogi kekuasaan lantas memengaruhi demokrasi suatu politik. Implikasi dan dampak dari percaturan politik genealogi kekuasaan dalam Pemilu 2024 di Indonesia dapat memiliki efek yang signifikan. Hal ini menjadi penyebab cacatnya demokrasi oleh karena terjadi monopoli kekuasaan (Rakhmat, 2013). Demokrasi yang cacat dalam genealogi kekuasaan ini tentu melenceng dari nilai dan semangat dasar konstitusi bangsa Indonesia. Maka, hal yang kerap kali muncul sebagai akibat dari politik genealogi kekuasaan ini adalah kerusakan etika dan sistem politik.

Dalam politik genealogi kekuasaan, ada kecenderungan untuk mempertahankan dan memperkuat kekuasaan yang telah ada. Hal ini dapat berdampak pada dominasi partai politik atau kelompok politik tertentu yang telah lama berkuasa. Implikasinya adalah terciptanya ketimpangan politik yang dapat menghambat pluralitas dan partisipasi politik yang sehat. Selanjutnya, konsolidasi otoritarianisme. Dalam politik genealogi kekuasaan, praktik-praktik otoriter seperti pemilihan tunggal atau dominasi satu partai dapat terjadi. Implikasinya adalah terancamnya demokrasi dan pembatasan kebebasan politik yang dapat menghambat partisipasi warga negara (Hardianto, 2019).

Adanya pembatasan akses dan Informasi. Praktik politik genealogi kekuasaan dapat menciptakan hambatan bagi partai politik dan kandidat yang tidak memiliki hubungan atau ikatan dengan kekuatan yang sudah mapan. Hal ini dapat menyebabkan pembatasan akses terhadap sumber daya politik dan informasi yang diperlukan untuk berkompetisi secara adil dalam pemilu. Terjadi konservatisme Ideologi Dalam politik genealogi kekuasaan, ideologi yang dominan cenderung dipertahankan dan diperkuat. Implikasinya adalah kurangnya ruang bagi ide-ide baru atau perspektif alternatif untuk masuk ke dalam arena politik. Ini dapat menghambat inovasi politik dan perubahan yang diperlukan dalam masyarakat (Susanto, 2021).

Implikasi selanjutnya adalah ketidaksetaraan politik dalam praktik politik genealogi kekuasaan dapat menghasilkan ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan politik. Kelompok-kelompok atau individu-individu yang tidak memiliki hubungan atau ikatan dengan kekuatan yang ada mungkin sulit untuk memperoleh akses yang sama ke sumber daya politik dan peluang politik. Ini dapat menghasilkan ketidakadilan politik yang dapat merugikan kelompok-kelompok minoritas atau masyarakat yang kurang berdaya (Prabowo dan Widodo, 2020).

Penting untuk mempertimbangkan implikasi dan dampak dari percaturan politik genealogi kekuasaan dalam Pemilu 2024. Mendorong demokrasi yang sehat, partisipasi politik yang inklusif, dan transparansi dalam proses politik dapat membantu mengatasi efek negatif yang mungkin timbul. Dalam sistem politik, hal yang menjadi poin utama adalah menjunjung tinggi nilai demokrasi yang integral. Jika hal ini tidak diperhatikan, maka demokrasi tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Demokrasi di Indonesia sendiri terus mengalami polemik yang semakin mengaburkan nilai demokrasi (Kusuma & Anugerah, 2017). Pengaruh percaturan politik genealogi kekuasaan terhadap demokrasi di Indonesia dapat memiliki beberapa dampak yang perlu diperhatikan.

Ketidaksetaraan dalam persaingan politik menjadi hal yang problematik. Jika terdapat dominasi kelompok atau individu tertentu dalam politik genealogi kekuasaan, hal ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam persaingan politik (Handayani & Suwardi, 2014). Pengaruh yang kuat dari kelompok atau individu yang memiliki kekuasaan turun temurun dapat menghambat partisipasi politik yang adil dan menguntungkan kelompok yang memiliki ikatan genealogi yang kuat.

Politik genealogi kekuasaan dapat memungkinkan kelompok atau individu tertentu untuk menguasai sumber daya politik secara ekonomi, sosial, dan budaya. Ini dapat menciptakan ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya politik, seperti akses terhadap dana kampanye, dukungan media, atau jaringan politik yang kuat. Dalam politik genealogi kekuasaan, ada kemungkinan kurangnya rotasi kekuasaan dan pergantian kepemimpinan (Santoso & Indrawan, 2017). Hal ini dapat menghambat perubahan dan inovasi politik yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dan aspirasi masyarakat yang terus berubah. Kurangnya rotasi kekuasaan juga dapat menciptakan stagnasi politik dan keengganan terhadap perubahan.

Ketidakadilan Demokrasi. Politik genealogi kekuasaan dapat menciptakan ketidakadilan dalam sistem demokrasi. Jika kelompok atau individu tertentu memiliki kekuasaan yang turun temurun, ini dapat menghalangi partisipasi politik yang merata dan kesetaraan kesempatan dalam pemilihan umum. Ketidakadilan ini dapat merusak integritas dan legitimasi sistem demokrasi (Susanto, 2021). Politik genealogi kekuasaan dapat menyebabkan dominasi oligarki politik, di mana kekuasaan terkonsentrasi pada segelintir individu atau kelompok. Hal ini dapat

menghambat partisipasi politik yang luas dan menciptakan kesenjangan antara elit politik dan masyarakat umum.

Untuk memperkuat demokrasi di Indonesia, perlu ada upaya untuk mengurangi pengaruh politik genealogi kekuasaan. Langkah-langkah seperti reformasi politik, kebijakan transparansi dan akuntabilitas, promosi partisipasi politik yang merata, serta penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu, dapat membantu mengurangi dampak negatif dari politik genealogi kekuasaan dan mendorong demokrasi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Foucault (1972) menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya membatasi, tetapi juga aktif dalam membentuk identitas individu dan pengetahuan yang dihasilkan dalam masyarakat. Dalam konteks pemilu, praktik politik dan diskursus kekuasaan dapat membentuk persepsi dan pengetahuan publik tentang calon, partai politik, dan isu-isu politik. Analisis genealogi politik kekuasaan mengungkapkan bagaimana identitas politik dan pengetahuan yang muncul dalam pemilu dapat dipengaruhi oleh kekuatan politik yang dominan.

Praktik politik genealogi dalam pemilu di Indonesia dapat memiliki konsekuensi etika yang perlu diperhatikan. Praktik politik genealogi dapat menciptakan ketidakadilan dan ketimpangan dalam persaingan politik (Kebung, 2017). Ketika kelompok atau individu tertentu memiliki kekuasaan yang turun temurun, mereka dapat memanfaatkan ikatan genealogi tersebut untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil dalam pemilu. Hal ini melanggar prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam konteks demokrasi.

Politik genealogi dapat membatasi partisipasi politik yang luas dan merata. Jika kekuasaan politik terkonsentrasi pada kelompok atau individu tertentu, maka ruang bagi partisipasi politik dari kelompok lain dapat menjadi terbatas. Hal ini dapat menghambat inklusi politik dan menghalangi aspirasi dan kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat (Rakhmat, 2013). Praktik politik genealogi dapat menghasilkan dominasi dan oligarki politik, di mana kekuasaan dan pengaruh politik terkonsentrasi pada segelintir individu atau kelompok yang memiliki ikatan genealogi yang kuat. Hal ini dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang tidak mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan.

Politik genealogi dapat memperkuat praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Jika kelompok atau individu tertentu secara dominan menguasai kekuasaan politik, mereka dapat memanfaatkan posisi tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompok mereka (Heryanto, 2019). Praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi dalam konteks politik genealogi melanggar prinsip-prinsip etika dan merusak integritas sistem politik. Politik genealogi dapat menciptakan kurangnya pertanggungjawaban dan transparansi dalam praktik politik. Ketika kekuasaan politik diturunkan secara turun-temurun, ada kemungkinan kurangnya akuntabilitas terhadap publik dan kurangnya keterbukaan dalam pengambilan keputusan politik. Hal ini dapat menghambat pembangunan demokrasi yang berbasis transparansi dan partisipasi publik yang luas.

Untuk mengatasi konsekuensi etika dari praktik politik genealogi dalam pemilu di Indonesia, penting untuk mempromosikan reformasi politik yang mendorong kesetaraan, keadilan, pertanggungjawaban, dan transparansi. Diperlukan upaya untuk memastikan partisipasi politik yang merata, memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum yang adil, serta mendorong partai politik yang inklusif dan demokratis.

Praktik genealogi politik kekuasaan dapat memiliki dampak yang signifikan pada partisipasi politik dan kebebasan warga negara. Praktik genealogi politik kekuasaan dapat menyebabkan pembatasan partisipasi politik yang merata. Jika kekuasaan politik terkonsentrasi pada kelompok atau individu tertentu, maka partisipasi politik dari kelompok lain dapat menjadi terbatas. Hal ini dapat menghambat inklusi politik dan menghalangi aspirasi dan kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat.

Ketidakadilan dalam Kompetisi Politik juga penting diperhatikan. Ketika praktik genealogi politik kekuasaan dominan, kompetisi politik yang adil dan merata dapat terganggu. Kelompok atau individu yang memiliki ikatan genealogi yang kuat mungkin memiliki akses lebih besar ke sumber daya politik, termasuk dana kampanye, dukungan media, dan jaringan politik. Hal ini menciptakan ketimpangan yang tidak seimbang dalam kompetisi politik dan melanggar prinsip demokrasi yang adil.

Praktik genealogi politik kekuasaan dapat menghambat kebebasan berpendapat dan ekspresi warga negara. Jika kekuasaan politik terkonsentrasi pada kelompok atau individu tertentu, maka suara-suara dan pandangan yang berbeda dapat dipadamkan atau diabaikan (Rusdiarti, 2008). Hal ini dapat menyebabkan pembatasan kebebasan berpendapat dan menghambat perdebatan publik yang sehat dan konstruktif. Dominasi genealogi politik kekuasaan dapat menghasilkan kurangnya alternatif politik yang beragam. Jika kekuasaan politik

hanya terkonsentrasi pada beberapa kelompok atau individu, maka pilihan politik yang tersedia untuk warga negara akan terbatas. Hal ini mengurangi ruang untuk inovasi politik, gagasan baru, dan perubahan yang diperlukan untuk menjaga kehidupan politik yang dinamis.

Praktik genealogi politik kekuasaan dapat memiliki dampak negatif pada sistem hukum dan keadilan. Jika kelompok atau individu dengan ikatan genealogi yang kuat memiliki pengaruh yang besar dalam politik, mereka dapat memanipulasi atau mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang adil. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam sistem hukum dan melemahkan kepercayaan warga negara terhadap lembaga-lembaga negara.

Dalam konteks ini, penting untuk mempromosikan partisipasi politik yang inklusif, mendorong kebebasan berpendapat, dan memperkuat keadilan politik. Reformasi politik, penegakan hukum yang adil, transparansi dalam pemilihan, dan pendidikan politik yang kuat dapat membantu mengatasi dampak negatif praktik genealogi politik kekuasaan.

e. Relevansi: Refleksi Kritis Politik Genealogi Kekuasaan dan Etika Michel Foucault dalam Pemilu 2024 di Indonesia

Dalam konteks pemilu 2024 di Indonesia, hubungan antara genealogi kekuasaan dan perspektif etika Michel Foucault memiliki hubungan yang erat. Politik kekuasaan merupakan demokrasi yang cacat dan merusak suatu sistem hidup berbangsa dan bernegara. Etika kekuasaan yang digagas oleh Michel Foucault (1977) sebagai usaha membangun sistem demokrasi yang mementingkan kehidupan seluruh rakyat (Flynn, & Rush, 2018). Dalam konteks Indonesia, sistem politik hendaknya mengarah pada demokrasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat juga untuk menjunjung tinggi martabat manusia (Aliano dan Riyanto, 2022).

Perspektif etika Foucault menekankan pentingnya menganalisis dan memahami dinamika kekuasaan dalam suatu konteks historis (Kebung, 2015). Genealogi kekuasaan merujuk pada upaya mempelajari asal usul, perkembangan, dan transformasi kekuasaan dalam suatu masyarakat. Dalam konteks pemilu di Indonesia, genealogi kekuasaan akan melibatkan penelusuran sejarah dan perkembangan kekuasaan politik, termasuk hubungan antara kelompok politik, struktur politik, dan praktik-praktik kekuasaan yang dominan.

Foucault (1995) juga mengatakan bahwa kekuasaan bukanlah entitas yang dikuasai atau diperoleh, tetapi lebih sebagai sebuah proses yang ada dalam hubungan sosial. Dalam pemilu, aktor politik menggunakan strategi kekuasaan untuk memengaruhi pemilih, memperoleh dukungan, dan mempertahankan posisi politik mereka. Genealogi kekuasaan memungkinkan untuk mengungkap strategi-strategi kekuasaan yang digunakan oleh aktor politik dalam pemilu 2024 di Indonesia, baik melalui media massa, kampanye politik, atau pengaruh dalam struktur politik.

Etika Foucault (1972) menekankan keterkaitan antara kekuasaan, pengetahuan, dan hukum dalam masyarakat. Dalam konteks pemilu, genealogi kekuasaan dapat mengungkap bagaimana hukum dan pengetahuan digunakan atau dimanipulasi oleh aktor politik untuk mempertahankan atau memperluas kekuasaan mereka. Etika Foucault mendorong kritis terhadap pemahaman tradisional tentang kebenaran dan keadilan, serta pemahaman tentang aturan dan norma yang memengaruhi pemilu.

Foucault (1980) menjunjung tinggi pentingnya kritis terhadap dominasi dan otoritas dalam masyarakat. Dalam pemilu, genealogi kekuasaan dapat mengungkap bagaimana dominasi dan otoritas politik tercipta, dipertahankan, dan diperkuat oleh aktor politik. Etika Foucault mendorong pemahaman bahwa kekuasaan tidak hanya terletak pada individu atau kelompok tertentu, tetapi ada dalam hubungan sosial yang kompleks. Oleh karena itu, dalam konteks pemilu, penting untuk mengkaji dan mempertanyakan aspek-aspek dominasi dan otoritas yang terkait dengan genealogi kekuasaan. Melalui perspektif etika Foucault dan analisis genealogi kekuasaan, pemilu 2024 di Indonesia dapat dilihat sebagai arena di mana praktik politik, struktur kekuasaan, dan hubungan sosial dapat ditelusuri sesuai dengan landasan hukum, demokrasi yang konstitusional dan menjunjung tinggi martabat manusia.

Foucault (1973) menekankan bahwa kekuasaan bukanlah sesuatu yang dimiliki atau diberikan, tetapi lebih sebagai hubungan sosial yang terjalin di dalam masyarakat. Politik kekuasaan juga berupaya memahami relasi kekuasaan yang terjadi antara aktor-aktor politik, struktur politik, dan masyarakat secara luas (Hardiyanta, 2007). Kekuasaan politik sering kali dipertahankan dan diperkuat melalui struktur dan mekanisme institusional tertentu yang dapat menindas atau membatasi kebebasan individu dan kelompok. Ia menganalisis kekuatan dan resistensi dalam relasi kekuasaan yang ada di dalam masyarakat dan berupaya mengungkap taktik dan strategi yang digunakan oleh aktor politik untuk mempertahankan atau melawan kekuasaan yang ada.

Dalam konteks perbaikan bahkan meningkatkan sistem pemilu di Indonesia, khususnya menjelang pemilu 2024, sangatlah penting untuk memahami dinamika politik dalam sistem demokrasi. Salah satu hal yang menjadi perhatian penulis dan refleksi kritik filosofis adalah adanya sistem genealogi kekuasaan yang mulai terbentuk dalam sistem demokrasi politik di Indonesia. Penulis menemukan Etika Kekuasaan yang digagas oleh Michel Foucault menjadi instrumen upaya kesadaran politik yang semakin kritis dan demokratis. Hal ini mengingatkan isu pemilu di Indonesia sangat menentukan nasib suatu bangsa, rakyat dan kemerdekaan yang telah diraih para pendahulu bangsa. Adapun beberapa hal yang menjadi perhatian penulis adalah sebagai berikut.

Pertama, Transparansi dan Akuntabilitas. Foucault menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam hubungan kekuasaan. Dalam konteks pemilu, pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu harus memastikan bahwa proses pemilu dilakukan secara transparan dan terbuka. Hal ini meliputi pengungkapan informasi mengenai pembiayaan kampanye, pemilihan anggota lembaga penyelenggara pemilu yang independen, serta kejelasan dalam proses perhitungan dan pengumuman hasil pemilu.

Kedua, Partisipasi yang Inklusif. Etika Foucault mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses kekuasaan. Dalam konteks pemilu, perbaikan sistem pemilu harus mencakup upaya untuk meningkatkan partisipasi politik yang inklusif. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran politik, pendidikan pemilih, dan pemberdayaan masyarakat dalam mengambil bagian dalam proses pemilu. Selain itu, memastikan aksesibilitas dan kesetaraan dalam partisipasi politik bagi semua kelompok masyarakat juga penting.

Keempat, Penghindaran Kekuasaan yang Represif. Foucault menyoroti bahaya dari kekuasaan yang represif dan pengendalian yang berlebihan. Dalam konteks pemilu, perbaikan sistem pemilu harus memperhatikan dan menghindari praktik-praktik kekuasaan yang membatasi kebebasan individu dan meredam pluralitas politik. Hal ini termasuk menghindari manipulasi politik, kampanye hitam, dan penindasan terhadap kelompok politik minoritas. Sistem pemilu yang adil dan terbuka harus memberikan ruang bagi berbagai suara politik untuk diungkapkan tanpa takut represi.

Kelima, Evaluasi Kritis terhadap Pengetahuan Politik. Foucault mengajukan pentingnya evaluasi kritis terhadap pengetahuan politik yang ada. Dalam konteks pemilu, perbaikan sistem pemilu harus melibatkan evaluasi terhadap narasi politik yang dominan, diskursus yang dibangun oleh aktor politik, dan pengetahuan politik yang dihasilkan. Ini akan memungkinkan masyarakat untuk mempertanyakan dan menganalisis klaim-klaim politik, melihat melampaui retorika politik, dan membuat keputusan politik yang lebih informasi dan kritis.

Perbaikan sistem pemilu di Indonesia, berdasarkan perspektif etika Foucault, akan mencerminkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi inklusif, penghindaran kekuasaan yang represif, dan evaluasi kritis terhadap pengetahuan politik. Hal ini akan memberikan landasan yang lebih kuat bagi demokrasi yang sehat, di mana pemilu menjadi wahana untuk mengungkapkan. Penulis juga menawarkan suatu upaya untuk meningkatkan partisipasi politik dan kebebasan dalam pemilu beberapa upaya yang dapat diperhatikan dan dapat dilakukan Pemerintah.

Kesadaran Politik dan Pendidikan Pemilih. Pemerintah perlu meningkatkan kesadaran politik di kalangan masyarakat sangat penting. Kampanye penyuluhan dan pendidikan pemilih perlu dilakukan secara intensif untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pemilu, proses pemilu, peran pemilih, dan implikasinya terhadap kehidupan masyarakat. Ini termasuk penyediaan informasi yang jelas tentang kandidat, partai politik, dan isu-isu politik yang relevan.

Aksesibilitas dan Kesetaraan. Pemerintah perlu memastikan aksesibilitas dan kesetaraan dalam partisipasi politik adalah langkah penting. Langkah-langkah seperti memastikan lokasi pemungutan suara yang mudah dijangkau oleh semua warga, penyediaan hak pilih bagi warga yang berkebutuhan khusus, dan pemetaan pemilih untuk memastikan distribusi yang merata dapat meningkatkan partisipasi politik dari kelompok yang kurang terwakili.

Penggunaan Teknologi dan Inovasi. Pemerintah harus memanfaatkan teknologi dan inovasi dapat memfasilitasi partisipasi politik yang lebih luas dan efektif. Misalnya, penggunaan platform *online* untuk pendaftaran pemilih, kampanye politik digital, dan pemantauan pemilu secara *real-time* dapat membuka ruang partisipasi yang lebih luas dan memudahkan akses bagi pemilih yang terhalang secara fisik atau geografis.

Pengawasan dan Transparansi. Pemerintah perlu memastikan pengawasan yang efektif selama proses pemilu adalah penting. Lembaga pemantau independen dan jurnalis harus diberikan kebebasan dan dukungan untuk melaporkan pelanggaran pemilu, kecurangan, dan

ketidakadilan yang terjadi. Transparansi dalam pembiayaan kampanye, pemrosesan suara, dan pengumuman hasil pemilu harus dijaga dengan baik untuk membangun kepercayaan publik.

Pelibatan Masyarakat Sipil. Pemerintah harus mendorong partisipasi aktif masyarakat sipil dalam pemilu adalah langkah penting. Menggalang kolaborasi antara organisasi masyarakat sipil, LSM, dan kelompok advokasi dengan lembaga pemilu dapat meningkatkan partisipasi pemilih dan pemantauan pemilu. Masyarakat sipil juga dapat berperan dalam mengedukasi pemilih, melindungi hak-hak pemilih, dan mengawasi integritas pemilu.

Keterwakilan Politik yang Inklusif. Pemerintah juga memastikan keterwakilan politik yang inklusif adalah prinsip penting dalam pemilu. Upaya harus dilakukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, minoritas, dan kelompok-kelompok marginal dalam proses pemilu, baik sebagai kandidat maupun dalam lembaga penyelenggara pemilu.

4. Simpulan

Perjalanan melacak jejak permainan politik dan pengaruh genealogi kekuasaan dalam sistem pemilu tahun 2024 di Indonesia melalui lensa etika Michel Foucault, dapat ditarik kesimpulan yang menggambarkan kerumitan dinamika politik sekaligus relevansi pemikiran Foucault terhadap realitas politik modern. Pertama, analisis genealogi kekuasaan dalam konteks sistem pemilu mengungkap kompleksitas hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan. Konsep Foucault tentang "*pemutusan benang kusut*" menyoroti bagaimana pengaruh kekuasaan tersembunyi dalam struktur-struktur sosial dan bagaimana pengetahuan diciptakan untuk mendukung kepentingan penguasa. Dalam pemilu '2024', terlihat bagaimana pengetahuan dan narasi politik dibentuk untuk mempertahankan eksistensinya. Kedua, etika Foucault yang mengajak untuk kritis terhadap otoritas dan mencari alternatif memberikan pandangan baru tentang peran partisipasi masyarakat dalam sistem pemilu. Masyarakat diharapkan tidak hanya sebagai pemilih pasif, tetapi juga sebagai individu yang kritis dan reflektif dalam merespon narasi politik yang diciptakan oleh kekuasaan. Pemilu '2024', itu sendiri memunculkan upaya memengaruhi opini publik melalui media sosial dan pengumpulan data. Pemahaman ini menggambarkan adanya dinamika kuasa yang mendasari kepentingan politik dalam menjaga kestabilan dan kontrol sosial. Maka, pemahaman tentang percaturan politik genealogi kekuasaan dalam sistem pemilu '2024' di Indonesia dengan menggunakan etika Michel Foucault membuka pemikiran terhadap dinamika kompleks dalam politik modern. Konsep-konsep Foucault mengajak untuk tetap kritis dan berempati terhadap bentuk-bentuk kuasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Dengan sikap kritis-etis yang tepat, kita dapat berperan dalam membentuk perubahan positif dan mewujudkan pemilu yang lebih adil dan representatif sesuai nilai luhur Pancasila dan UUD 1945.

5. Daftar Pustaka

- Aliano, Y. A., Riyanto, A. (2022). Pemulihan Martabat Manusia dalam Perspektif Metafisika Persahabatan. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 5(2), 162–172.
- Barry, A., Osborne, T., & Rose, N. (Eds.). (1996). *Foucault and Political Reason: Liberalism, Neo-Liberalism, and Rationalities of Government*. University of Chicago Press.
- Dean, M. (1999). *Governmentality: Power and Rule in Modern Society*. Sage Publications.
- Flynn, T., & Rush, F. (2018). *The Foucault Handbook*. Bloomsbury Publishing.
- Foucault, Michel. (1977). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Terj. Allan seriden. Pantheon Books.
- _____. (1965). *Madness and Civilization*. Terj. Richard Howard. Pantheon Books.
- _____. (1980). *Power/ Knowledge: selected Interviews and Other Writings 1972-1977*. Ed. Colin Gordon. Pantheon Books.
- _____. 1972. *The Archeology of Knowledge*. Terj. Terj. Allan seriden. Pantheon Books.
- _____. (1977). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Vintage Books.
- _____. (1978). *The History of Sexuality, Volume I: An Introduction*. Vintage Books.
- Gordon, C. (1991). *Governmental rationality: An introduction*. In G. Burchell, C. Gordon, & P. Miller (Eds.), *The Foucault Effect: Studies in Governmentality* (pp. 1-51). University of Chicago Press.

- Hardianto, B. (2019). Power Relations and Ethical Practices in Political Campaigns: A Genealogical Perspective on Indonesian Politics. *Jurnal Politik*, 5(1), 19-34.
- Handayani, D., & Suwardi, S. (2014). Ethics and Power in Political Campaigns: A Genealogical Analysis in the Context of Indonesian Politics. *Jurnal Studi Politik*, 1(1), 27-42.
- Hardiyanta, Petrus Sunu. (2007). *Foucault-Bengkel Individu Modern, Disiplin Tubuh*. LKIS.
- Heryanto, D. G. G. (2019). *Literasi Politik: Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pascareformasi* (M. hanifuddin (ed); cet 1). IRCiSoD.
- Hicks, Stephen R. C. (2004). *Explaining Postmodernism, Sekpticism and Socialism from Rousseau to Foucault*. Scholargy Publishing.
- Kamahi, Umar. (2017). Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik. *Jurnal Al-Khitabiah*. 3 (1): 117-133.
- Kebung, Konrad. (2017). Membaca 'Kuasai' Michel Foucault Dalam Konteks 'Kekuasaan' di Indonesia. *Jurnal Melintas: STFK Ledalero*, 33(1), 34-51.
- Khozin Af, A., & Ushuluddin, F. (n.d.) (2012). Konsep Kekuasaan Michel Foucault. Teosofi: *Jurnal tasawuf dan Pemikiran Islam* Vol 2 No. 1, 131-149.
- Kusuma, H., & Anugrah, R. (2016). Political Campaigns in Indonesia: A Genealogical Perspective on Power and Ethics. *Jurnal Politik Indonesia*, 2(1), 43-58.
- Nurudin, I. (2017). *Etika Pemerintahan: Norma. Konsep dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintah*. Lintang Rasi Aksara Books.
- Prabowo, A., & Widodo, S. (2020). The Politics of Power and Ethics: A Genealogical Analysis of Political Campaigns in Indonesia. *Jurnal Kajian Politik*, 8(2), 153-168.
- Pranowo, A., & Wijaya, A. (2015). Genealogy of Power and Ethical Challenges in Political Campaigns in Indonesia. *Jurnal Kajian Politik*, 3(2), 123-138.
- Pratama, A., & Winarno, B. (2013). Power Relations and Ethical Practices in Political Campaigns: A Genealogical Study in Indonesian Politics. *Jurnal Politik Indonesia*, 1(2), 75-90.
- Rabinow, P. (1984). *The Foucault Reader: An Introduction to Foucault's Thought*. Penguin Books.
- Rahayu, Y., & Raharjo, W. (2018). Genealogy of Power and the Ethics of Political Campaigns in Indonesia. *Jurnal Studi Politik*, 3(2), 127-140.
- Riyanto, Armada and Ohoitumur, Johanis and Mulyatno, C.B. and Madung, Otto Gusti, eds. (2015). *Kearifan Lokal ~ PANCASILA. Butir-Butir Filsafat Keindonesiaan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Santoso, A., & Indrawan, A. (2017). Power Relations, Ethics, and Political Campaigns: A Genealogical Study in Indonesian Politics. *Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 1-16.
- Sugiharto I. Bambang. 2000. *Postmoderenisme, Tantangan bagi Filsafat*. Kanisius.
- Susanto, E. (2021). Genealogy of Power and Ethical Dilemmas in Political Campaigns in Indonesia. *Jurnal Etika Politik*, 8(2), 211-226.
- Rakhmat, Muhammad. (2013). *Etika Profesi: Etika Dasar Setiap Profesi Kehidupan dalam Perspektif Hukum Positif*. LoGoz Publishing.
- Rusdiarti, Suma Riella. (2008). *Struktur dan Sifatnya dalam Pemikiran Michel Foucault*. Universitas Indonesia.
- Taylor, D. L., & Curtis, B. (Eds.). (2015). *Genealogy and Ontology of the Western Image and its Digital Future*. Routledge.
- Wiradnyana, Ketut. (2018). *Michel Foucault: Arkeologi Pengetahuan dan Pengetahuan Arkeologi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Yani, Wa Ode Nurul. (2016). Relasi Pengetahuan dan Kekuasaan dalam Formasi Diskursif Bio-Politik Michel Foucault Sebuah Kajian Kritis Komunikasi Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Dialektika*, 3 (1), 1-14.